

Judul : Proyek infrastruktur kembali jadi panglima ekonomi: Belanja infrastruktur naik, bansos digunting
Tanggal : Senin, 18 April 2022
Surat Kabar : Hukum Online
Halaman : 1 dan 2

■ ANGGARAN TAHUN 2023

Proyek Infrastruktur Kembali Jadi Panglima Ekonomi

Siti Masitoh, Dendi
Siswanto, Ratih Waseso

JAKARTA. Proyek infrastruktur kembali menjadi panglima penggerak ekonomi tahun 2023. Tahun depan atau setahun menjelang pemilihan umum 2024, pemerintah menyiapkan anggaran jumbo untuk proyek infrastruktur.

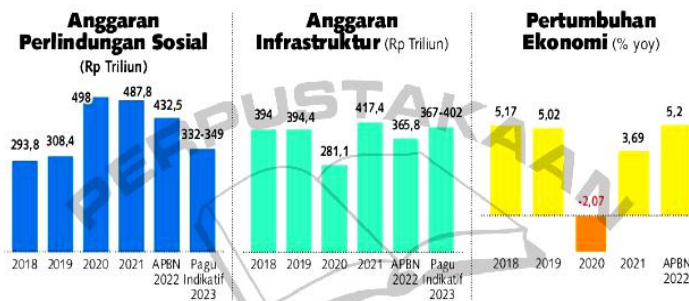
Sebagai gambaran, tahun depan pemerintah merancang anggaran proyek infrastruktur hingga senilai Rp 402 triliun. Nilai tersebut naik 9,89% ketimbang alokasi dana infrastruktur di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang senilai Rp 365,8 triliun. Salah satu pendorong kenaikan anggaran proyek infrastruktur tahun 2023 adalah alokasi dana proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang senilai Rp 27 triliun-Rp 30 triliun.

Selain dana infrastruktur, pemerintah menetapkan pagu indikatif dana perlindungan sosial tahun depan sekitar Rp 332 triliun-Rp 349 triliun, turun dibanding tahun 2021 dan tahun 2022 (lihat tabel).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, sesuai perintah Presiden Joko Widodo, alokasi dana infrastruktur dan perlindungan sosial bertujuan untuk menjaga keyakinan dan stabilitas ekonomi dalam negeri. Situasi ini diharapkan akan menaikkan investasi swasta di

Realisasi APBN dan Pagu Indikatif 2023 (Rp triliun)						
Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	APBN 2022	Pagu Indikatif 2023
1. Pendapatan Negara	1.042,3	1.960,6	1.633,59	2.003,06	1.846,1	2.255,5-2.383,6
2. Belanja Negara	2.202,2	2.309,3	2.589,9	2.786,76	2.714,2	2.818,1-2.979,3
3. Defisit Anggaran	259,9	348,7	956,30	783,70	868,0	562,6-596,7
% PDB	1,76	1,84	6,09	4,65	4,85	2,81-2,95
4. Pembiayaan Anggaran	300,4	402,1	1.190,95	868,63	868,0	562,6-596,7

Sumber: Kemkeu



proyek infrastruktur.

Kenaikan alokasi dana proyek infrastruktur ini bisa berdampak positif bagi ekonomi. Perhelatan proyek infrastruktur dengan biaya jumbo berpeluang mengulirkan ekonomi secara keseluruhan.

Namun di sisi lain, alokasi besar dana infrastruktur ini juga menyimpan risiko, terutama bisa digunakan untuk membiayai proyek-proyek tahun jamak alias *multiyears*.

Maklum pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir Oktober 2024, sehingga proyek *multiyears* berisiko macet jika pemerintahan berikutnya mengesampingkan proyek yang dirintis oleh pemerintahan sekarang.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) dan Pengamat Politik Ujang Komarudin mengingatkan, jumbonya anggaran infrastruktur dan perlindungan sosial di ta-

hun depan rawan menjadi bancakan di tahun politik. Oleh karena itu, ia berharap, penggunaan dana infrastruktur dan dana perlindungan sosial diawasi ketat agar tak diselewengkan untuk pendanaan politik. "Kita harus mengawal bersama-sama, agar tidak terjadi penyalahgunaan," kata dia, Minggu (17/4).

Ekonomi Center of Reform on Economics Indonesia (Core) Yusuf Rendi Manilet juga

menyuarakan hal senada. Ia meminta pemerintah terus memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala. Pembaruan DTKS ini penting dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya *error* dalam penyaluran bantuan sosial maupun salah sasaran yang bermotif kepentingan politik.

Ihwal penggunaan anggaran infrastruktur, Yusuf menyarankan supaya pemerintah mengonsolidasikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembangunan infrastruktur. Dia menilai, pembangunan infrastruktur yang masif selama ini justru menekan kinerja BUMN.

"Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) tidak optimal, akhirnya BUMN karya harus mencari utang dari luar negeri dan mengganggu arus kas BUMN," tambah Yusuf.

Sementara Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi menilai, pemerintah sudah berpengalaman mengelola anggaran infrastruktur dan anggaran perlindungan sosial yang jumbo. Alhasil, dia tak khawatir dua pos anggaran itu bakal diselewengkan untuk kepentingan politik. "Setiap penggunaan anggaran tentunya diperkuat sistem pengawasan yang ketat juga transparansi," katanya.

Lihat halaman 2

Belanja Infrastruktur Naik, Bansos Digunting

Tahun depan, pagu indikatif infrastruktur Rp 402 triliun dan perlindungan sosial Rp 349 triliun

Siti Masitoh

JAKARTA. Kondisi perekonomian Indonesia tahun depan diprediksi masih masuk fase pemulihan. Namun di satu sisi pemerintah sudah mulai mengongkrak lagi anggaran infrastruktur. Sementara di sisi lain, pemerintah juga memangkas anggaran perlindungan sosial.

Dalam paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat kabinet terbatas di Istana Presiden, Kamis (14/4), pemerintah menetapkan pagu indikatif anggaran infrastruktur 2023 sekitar Rp 367 triliun hingga Rp 402 triliun. Angka ini naik dibanding pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp 365,8 triliun.

Bahkan, pagu indikatif ini lebih besar ketimbang anggaran infrastruktur sebelum pandemi Covid-19, atau 2019 sebesar Rp 394,1 triliun. Menkeu bilang, anggaran infrastruktur naik karena sektor ini jadi fokus pemerintah.

Di sisi lain, pagu indikatif anggaran perlindungan sosial 2023 sekitar Rp 332 triliun - Rp 349 triliun, atau turun ketimbang anggaran 2022 sebesar Rp 431,5 triliun.

Menurut Menkeu, dana ini

akan disalurkan kepada masyarakat untuk mendorong perlindungan yang makin adaptif. Menkeu menyebut penerima program perlindungan sosial terus di mutakhirkan. Meski anggaran menurun, ia memastikan, APBN akan tetap mendukung pemulihan ekonomi dan mendukung program-program pembangunan nasional.

Saat PDB membesar belanja sosial juga harus ditambah.

Perbesar bantuan

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talatov mengatakan, dinamika ekonomi tahun ini sangat menantang khususnya dari sisi tekanan inflasi global. Karena itu ia berpendapat pemerintah perlu memprioritaskan dan menambah bantuan sosial pada tahun depan.

Apalagi 2023 masih menjadi tahun pemulihan ekonomi. Di sisi lain pemerintah juga

berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) seperti Pertalite, tarif dasar listrik, dan elpiji 3 kilogram.

Abra khawatir, keputusan pemerintah untuk mengerek harga energi akan menambah jumlah penduduk miskin. Jika kemiskinan meningkat maka pemerintah harus menggelontorkan—bantuan.

"Paling tidak, anggaran perlindungan sosial 2023 setara dengan 2020 dan 2021, atau lebih besar lagi," kata Abra.

Tambahan anggaran ini bisa didapat pemerintah dari efisiensi belanja tidak mendesak, seperti belanja barang dan jasa, termasuk infrastruktur. Untuk infrastruktur, pemerintah bisa mengoptimalkan peran Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Pendapat senada juga disampaikan oleh Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Menurut hitungan Bhima, jika harga kebutuhan pokok dan energi bersifat persisten hingga 2023, maka pemerintah perlu menaikkan anggaran perlindungan sosial tahun depan.

Bhima menyatakan bahwa anggaran perlindungan sosial yang ideal bagi Indonesia pada tahun depan sebesar

Rp 500 triliun hingga Rp 550 triliun atau sekitar 2,9% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Sementara berdasarkan pagu indikatif yang direncanakan pemerintah anggaran perlindungan sosial tahun depan hanya setara 1,8% dari PDB. Adapun estimasi pemerintah PDB berdasarkan harga berlaku di tahun 2023 yang sebesar Rp 18.532 triliun.

Bhima mengkalkulasi, berdasarkan pengalaman tahun 2021 lalu, porsi anggaran perlindungan sosial Indonesia sebesar 2,8% dari PDB. Jika PDB Indonesia semakin besar tahun depan, makin porsi anggaran perlindungan sosialnya juga harus ditambah sebagai bantalan sosial. Tambahan ini penting untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global. ■

Tahun 2023, Alokasi Proyek IKN Mencapai Rp 30 Triliun

PEMERINTAH mengalokasikan anggaran pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Besaran pagu indikatif dari proyek di Kalimantan Timur tersebut, mencapai Rp 27 triliun hingga Rp 30 triliun.

Anggaran tersebut masuk dalam anggaran infrastruktur tahun depan yang direncanakan total berkisar antara Rp 367 triliun hingga Rp 402 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, rancangan anggaran IKN tahun 2023 akan dialokasikan untuk membangun infrastruktur dasar, seperti akses jalan, dan membangun gedung pemerintahan Kementerian Perhubungan.

Tak hanya itu, dana ini juga akan digunakan untuk membangun berbagai simpul konektivitas di sepanjang jalan ibukota baru Kalimantan Timur, hingga membangun sarana prasarana pendidikan.

"Begitu juga untuk sarana prasarana di bidang kesehatan, pertahanan, dan keamanan," tambahnya.